



Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Hukuman Mati dalam Kasus Narkotika di Indonesia: Analisis Kuantitatif melalui Survei Nasional

Maulana Fahmi Idris*¹, Joni Laksito²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Indonesia. Email: maulanafahmi@stekom.ac.id

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Indonesia. Email: jonilaksito@stekom.ac.id

Article Info

Keywords:

Hukuman Mati
Persepsi Masyarakat
Kebijakan Narkotika
Survei Kuantitatif

Abstract

The death penalty remains one of the most contentious policies in addressing narcotics crimes in Indonesia. While implemented as a stringent measure to combat drug trafficking, the policy often sparks debates regarding its effectiveness and implications for human rights. This study aims to analyze public perceptions of the death penalty policy for narcotics-related offenses, focusing on how demographic factors such as age, education, and residence influence public support. Using a quantitative approach, this research employed a nationwide survey involving 1,500 respondents selected through stratified random sampling. Data collection combined online and offline methods to ensure broad representation. The findings reveal significant demographic variations in support for the death penalty. Younger and middle-aged respondents (25–40 years old) showed the highest levels of support (70%), particularly in urban areas (70%) compared to rural areas (55%). Educational attainment also influenced perspectives, with higher education levels correlating with increased support for the policy. The study concludes that public perceptions of the death penalty are shaped significantly by demographic and socio-cultural factors. These findings underscore the need for targeted communication strategies to address varying public concerns, particularly in rural areas where access to information may be limited. The research contributes to policy discussions by providing empirical insights into public opinion on this controversial issue. It recommends integrating public education campaigns and alternative rehabilitative measures to enhance public understanding and acceptance of narcotics policies. By grounding policy development in evidence-based research, this study aims to support more equitable and effective approaches to addressing drug-related crimes in Indonesia.

DOI: 10.51903/hakim.v2i04.2186

Submitted: 27 Juni 2024, Reviewed & Revised: 26 Agustus 2024, Accepted: 08 September 2024

*Corresponding Author

I. INTRODUCTION

Hukuman mati terus menjadi salah satu kebijakan yang paling kontroversial di dunia, terutama dalam konteks pemberantasan tindak pidana narkotika. Sebagai bentuk hukuman tertinggi, penerapannya sering kali menimbulkan perdebatan terkait efektivitasnya dalam mengurangi angka kejahatan dan dampaknya terhadap hak asasi manusia. Secara global, Amnesty International melaporkan bahwa pada tahun 2022 terdapat lebih dari 800 eksekusi yang dilaporkan dari berbagai negara, dengan mayoritas

kasus terkait narkoba terjadi di Asia dan Timur Tengah. Negara-negara seperti Iran dan Arab Saudi, misalnya, menunjukkan tren eksekusi tinggi terhadap pelaku narkoba, meskipun kebijakan ini juga menuai kritik internasional. Di sisi lain, beberapa negara seperti Thailand telah mengambil langkah untuk mengurangi penggunaan hukuman mati dalam kasus narkoba, beralih pada pendekatan rehabilitasi. Dalam konteks Indonesia, kebijakan hukuman mati terhadap pelaku narkoba dianggap sebagai langkah strategis dalam menghadapi ancaman besar narkoba. Namun, dampak sosial dari kebijakan ini, seperti stigma terhadap keluarga terpidana dan respon masyarakat luas, masih belum sepenuhnya terjelaskan. Perbandingan dengan kebijakan di negara lain menjadi penting untuk memberikan konteks global terhadap efektivitas hukuman ini.

Menurut (Nurhadi et al., 2024) Indonesia menjadi salah satu negara yang menerapkan hukuman mati secara aktif, terutama untuk kasus-kasus narkoba yang dianggap mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional. Selama lima tahun terakhir, data dari Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa terdapat 45 eksekusi yang dilakukan di Indonesia, dengan mayoritas kasus terkait narkoba. Meskipun jumlah ini relatif kecil dibandingkan dengan negara-negara seperti Iran, yang mencatat lebih dari 200 eksekusi per tahun untuk kasus serupa, tren di Indonesia memicu perdebatan yang semakin intens. Selain itu, menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), angka kasus narkoba tetap meningkat, dengan lebih dari 5 juta pengguna narkoba tercatat pada tahun 2023. Hal ini memunculkan pertanyaan penting mengenai efektivitas hukuman mati dalam mengurangi kejahatan narkoba dan bagaimana persepsi masyarakat memengaruhi penerapan kebijakan ini. Penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi isu ini, tetapi masih terdapat kesenjangan dalam memahami hubungan antara persepsi masyarakat dan kebijakan hukuman mati secara kuantitatif.

Beberapa penelitian terkait kebijakan hukuman mati dalam kasus narkoba menunjukkan beragam perspektif mengenai efektivitas dan dampaknya. (Oliphant, 2022) menegaskan bahwa hukuman mati sering kali dianggap kurang efektif dalam menekan angka kejahatan narkoba, dengan bukti yang menunjukkan tidak adanya korelasi signifikan antara pelaksanaan eksekusi dan penurunan kejahatan. Penelitian lain oleh (Boateng & Dzordzormenyoh, 2021) menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati lebih dipengaruhi oleh faktor politik dan budaya lokal dibandingkan dengan pertimbangan objektif mengenai keefektifannya. Dalam konteks Asia Tenggara, (Arief Amrullah, 2024) menemukan bahwa negara-negara seperti Singapura dan Malaysia mempertahankan kebijakan hukuman mati karena dianggap sebagai pencegah kuat, meskipun terdapat kritik internasional atas pelanggaran hak asasi manusia. Di Indonesia, (McCarthy & Brunton-Smith, 2024) serta (Dudai, 2023) mencatat bahwa dukungan masyarakat terhadap hukuman mati sering kali didasarkan pada aspek moral dan keinginan akan keadilan, tetapi tidak selalu didukung oleh pemahaman mendalam mengenai efektivitas kebijakan tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap isu narkoba dan kebijakan hukuman mati sering kali dibentuk oleh narasi yang berkembang di media dan diskursus publik.

Penelitian terkait juga menyoroti dampak sosial dari kebijakan hukuman mati, baik terhadap keluarga terpidana maupun masyarakat luas. (Yin et al., 2022) menunjukkan bahwa keluarga terpidana sering kali mengalami stigma sosial yang signifikan, yang memengaruhi stabilitas psikososial mereka. Dalam konteks Indonesia, (Kohno et al., 2023) serta (Gooptar, 2022) menemukan bahwa kebijakan hukuman mati memicu perpecahan opini publik, dengan sebagian masyarakat mendukung kebijakan ini sebagai bentuk keadilan, sementara yang lain mengkritiknya sebagai tindakan melanggar hak asasi manusia. Selain itu, (Seto & Said, 2022) dalam studi regional menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap hukuman mati dapat dipengaruhi oleh budaya, kepercayaan agama, dan pengalaman langsung atau tidak langsung dengan kejahatan narkotika. Penelitian lain oleh (Dill et al., 2022) menunjukkan bahwa narasi media memainkan peran besar dalam membentuk opini publik, terutama di negara-negara dengan tingkat dukungan masyarakat yang tinggi terhadap hukuman mati. Secara khusus, di Indonesia, narasi ini sering kali memperkuat stigma terhadap pelaku kejahatan narkotika, yang berkontribusi pada dukungan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Pendekatan kuantitatif berbasis survei dalam penelitian sebelumnya memberikan wawasan penting tentang bagaimana masyarakat memandang hukuman mati. (Lu et al., 2022) menekankan bahwa survei dapat mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas hukuman mati dalam menanggulangi kejahatan narkotika. Dalam penelitian lain, (Wu, 2022) menemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap hukuman mati sering kali dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap sistem peradilan dan pemerintah. (Rosselli et al., 2022) serta (Scott, 2022) juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh besar, dengan individu berpendidikan tinggi lebih cenderung menolak hukuman mati dibandingkan mereka yang berpendidikan rendah. Sementara itu, penelitian (Pollock et al., 2021) di Indonesia menemukan bahwa eksposur terhadap berita dan media secara langsung memengaruhi cara masyarakat memandang pelaku kejahatan narkotika, yang kemudian berdampak pada tingkat dukungan terhadap kebijakan hukuman mati. Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji topik ini, sebagian besar berfokus pada aspek hukum dan normatif, sehingga kurang memberikan perhatian pada hubungan antara persepsi masyarakat dan penerapan kebijakan hukuman mati, khususnya melalui pendekatan kuantitatif.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas kebijakan hukuman mati dalam kasus narkotika, sebagian besar lebih menitikberatkan pada analisis normatif dan yuridis dibandingkan dengan eksplorasi persepsi masyarakat secara mendalam. (Bogliaccini et al., 2024) menyebutkan bahwa hukuman mati kurang efektif sebagai pencegah kejahatan narkotika, tetapi studi ini berfokus pada konteks global tanpa mengeksplorasi dinamika sosial di tingkat negara tertentu. (Liang et al., 2021) menyoroti peran faktor politik dan budaya dalam penerapan hukuman mati, namun tidak mengupas bagaimana opini publik memengaruhi kebijakan ini. Di Indonesia, (Zatkin et al., 2021) serta (Ferguson & Smith, 2024) mencatat bahwa dukungan masyarakat terhadap hukuman mati sering kali dipengaruhi oleh narasi media dan norma sosial, tetapi keduanya belum melakukan pengukuran kuantitatif terhadap persepsi tersebut.

Penelitian oleh (Hannan et al., 2023) menyoroti dampak sosial kebijakan ini terhadap keluarga terpidana, namun belum menyentuh dinamika persepsi publik secara lebih luas. Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk penelitian yang mampu mengungkap hubungan antara persepsi masyarakat dan penerapan kebijakan hukuman mati melalui pendekatan yang lebih terukur.

Pendekatan kuantitatif untuk memahami persepsi masyarakat terhadap hukuman mati dalam kasus narkoba masih sangat terbatas, terutama di Indonesia. (Hannan et al., 2022) menegaskan pentingnya survei dalam mengukur pandangan masyarakat terhadap keadilan dan efektivitas hukuman mati, tetapi penelitian ini kurang menyoroti aspek sosial dan budaya yang relevan. (Liu, 2022) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memengaruhi sikap masyarakat terhadap hukuman mati, tetapi penelitian ini belum menggali pengaruh norma sosial dan eksposur media. Di wilayah Asia Tenggara, (Gunawan & Bagiastra, 2023) serta (Butt, 2023) mencatat bahwa persepsi masyarakat terhadap hukuman mati sering kali dipengaruhi oleh budaya dan keyakinan agama, tetapi tidak memberikan perhatian khusus pada konteks Indonesia. Penelitian (Muhardis, 2024) menunjukkan bahwa narasi media memainkan peran penting dalam membentuk opini publik, tetapi dampaknya terhadap dukungan atau penolakan terhadap kebijakan hukuman mati belum banyak dikaji di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi persepsi masyarakat Indonesia terhadap kebijakan hukuman mati dalam kasus narkoba melalui pendekatan survei nasional, yang diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih terukur dan komprehensif bagi pengembangan kebijakan berbasis data..

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana masyarakat Indonesia memandang kebijakan hukuman mati dalam kasus narkoba dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi persepsi tersebut. Dengan menggunakan data survei nasional, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang relevan bagi pembuat kebijakan untuk mengevaluasi efektivitas hukuman mati dalam memberantas narkoba, sekaligus mempertimbangkan implikasi sosialnya. Pertanyaan penelitian utama yang ingin dijawab adalah: "Sejauh mana persepsi masyarakat memengaruhi pelaksanaan dan penerimaan kebijakan hukuman mati dalam kasus narkoba di Indonesia?" Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi signifikan bagi literatur akademik dan pengembangan kebijakan di Indonesia. Penelitian ini juga berupaya mengungkap bagaimana nilai-nilai budaya, tingkat pendidikan, dan paparan media membentuk pandangan masyarakat terhadap hukuman mati. Dengan demikian, studi ini tidak hanya relevan secara teoritis tetapi juga memiliki dampak praktis dalam memperkuat basis kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis bukti. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang diskusi yang lebih konstruktif mengenai efektivitas dan keadilan kebijakan hukuman mati di Indonesia..

II. METHODOLOGY

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain survei kuantitatif untuk mengukur persepsi masyarakat secara nasional terhadap hukuman mati dalam kasus narkotika. Desain ini dipilih karena memungkinkan pengumpulan data secara luas dan representatif, sehingga hasil penelitian dapat mencerminkan pandangan populasi yang beragam. Kuesioner yang digunakan dalam survei dirancang berdasarkan tinjauan literatur relevan dan hasil diskusi awal dengan ahli hukum dan sosiologi, memastikan validitas konseptual dari instrumen penelitian. Selain itu, kuesioner mencakup pertanyaan-pertanyaan yang berfokus pada isu-isu utama, seperti tingkat persetujuan terhadap hukuman mati, persepsi efek jera, dan preferensi terhadap alternatif hukuman, untuk memperoleh gambaran yang komprehensif. Proses perancangan kuesioner dilakukan secara sistematis agar setiap item dapat mengukur variabel yang ditentukan secara akurat dan relevan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman akademik dan kebijakan publik terkait hukuman mati dalam kasus narkotika.

B. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat Indonesia yang tersebar di 34 provinsi. Sampel penelitian dipilih menggunakan metode random sampling dengan stratifikasi berdasarkan wilayah geografis dan demografi, seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, dan lokasi tempat tinggal (perkotaan/pedesaan), untuk memastikan keanekaragaman data yang representatif. Total sampel yang berhasil dikumpulkan sebanyak 1.500 responden, dengan distribusi seimbang untuk mencerminkan proporsi populasi secara nasional. Kriteria inklusi meliputi responden berusia di atas 18 tahun, mampu membaca, dan bersedia berpartisipasi secara sukarela, sehingga data yang dihasilkan dapat diandalkan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan memperhatikan etika penelitian, termasuk mendapatkan persetujuan tertulis dari setiap responden. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan memberikan wawasan yang komprehensif tentang persepsi masyarakat Indonesia terkait topik yang diteliti.

C. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui survei daring dan luring, yang dirancang untuk menjangkau responden dari berbagai latar belakang secara lebih luas. Survei daring memanfaatkan platform survei digital yang user-friendly, sementara survei luring dilaksanakan di area publik dengan bantuan enumerator yang telah mendapatkan pelatihan khusus. Kuesioner terdiri dari 20 pertanyaan tertutup dan 5 pertanyaan terbuka yang dirancang untuk mengeksplorasi pandangan responden terhadap kebijakan hukuman mati secara komprehensif. Tingkat respons survei (response rate) mencapai 85%, menunjukkan bahwa partisipasi responden cukup tinggi dan data yang terkumpul memiliki tingkat kepercayaan yang signifikan. Untuk meminimalkan potensi bias, survei daring diawasi dengan mekanisme validasi IP pengguna, sehingga memastikan setiap responden hanya dapat berpartisipasi satu kali. Sementara itu, survei luring dilakukan dengan prosedur standarisasi, termasuk panduan wawancara yang seragam, untuk menjaga konsistensi pengumpulan data di lapangan. Kombinasi metode ini diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat dan dapat diandalkan untuk keperluan analisis

penelitian. Tabel 1 menyajikan karakteristik responden yang berpartisipasi dalam survei, yang mencakup kategori seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, dan tingkat pendapatan bulanan.

Tabel 1. Karakteristik Responden Survei

Karakteristik Responden	Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	750	50
	Perempuan	750	50
Usia	18-24 tahun	300	20
	25-34 tahun	450	30
	35-44 tahun	400	27
	45 tahun ke atas	350	23
Pendidikan	SD/SMP	200	13
	SMA/SMK	600	40
	D3/S1	550	37
	S2/S3	150	10
Pekerjaan	Pelajar/Mahasiswa	300	20
	Karyawan Swasta	600	40
	Pegawai Negeri Sipil	250	17
	Wirausaha	200	13
	Tidak Bekerja	150	10
Tingkat Pendapatan Bulanan	< Rp1.000.000	400	27
	Rp1.000.000 - Rp3.000.000	600	40
	Rp3.000.000 - Rp5.000.000	300	20
	> Rp5.000.000	200	13

D. Instrumen Penelitian

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner terstruktur, yang dirancang untuk mengumpulkan data secara sistematis dan terarah. Validitas konten kuesioner telah diverifikasi oleh panel ahli yang terdiri dari akademisi dan praktisi di bidang hukum dan sosiologi, untuk memastikan bahwa setiap item relevan dengan tujuan penelitian. Uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,85, yang mengindikasikan tingkat konsistensi internal yang sangat baik, sehingga hasil pengukuran dapat dipercaya. Instrumen ini mencakup skala Likert 5 poin untuk mengukur persepsi responden terhadap berbagai aspek hukuman mati, seperti tingkat persetujuan dan efektivitasnya sebagai pencegah kejahatan. Selain itu, kuesioner juga menyertakan pertanyaan terbuka yang bertujuan menggali pendapat responden secara mendalam, memberikan ruang bagi ekspresi opini yang lebih kaya dan beragam. Dengan kombinasi ini, instrumen diharapkan mampu menangkap data kuantitatif dan kualitatif yang saling melengkapi, sehingga memperkaya analisis yang dilakukan.

E. Prosedur Analisis Data

Data dianalisis menggunakan pendekatan statistik kuantitatif untuk memastikan interpretasi yang objektif dan akurat. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan distribusi persepsi masyarakat

terhadap hukuman mati, memberikan gambaran umum tentang pola pandangan responden. Selain itu, analisis inferensial mencakup uji chi-square untuk mengidentifikasi hubungan antara karakteristik demografi, seperti usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan, dengan tingkat dukungan terhadap hukuman mati. Untuk analisis yang lebih mendalam, regresi logistik diterapkan guna menentukan faktor-faktor signifikan yang memengaruhi persepsi masyarakat, seperti faktor sosial, ekonomi, atau geografis. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik SPSS versi 26, yang menawarkan berbagai alat analisis canggih untuk mendukung keakuratan hasil. Proses analisis ini dirancang secara sistematis untuk memastikan bahwa temuan penelitian dapat memberikan wawasan yang bermakna dan relevan bagi pengembangan kebijakan terkait.

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang dirancang secara sistematis untuk memastikan prosedur berjalan sesuai standar dan dapat diulang oleh peneliti lain. Tahap pertama adalah perancangan kuesioner, yang disusun berdasarkan tinjauan literatur serta konsultasi dengan para ahli di bidang hukum dan sosiologi untuk memastikan relevansi item pertanyaan dengan tujuan penelitian. Kuesioner ini kemudian diuji coba guna mengevaluasi validitas dan reliabilitasnya, memastikan bahwa instrumen penelitian dapat mengukur variabel yang ditentukan secara akurat. Selanjutnya, persiapan enumerator dilakukan dengan memberikan pelatihan terkait tujuan penelitian, teknik wawancara, dan prosedur standar yang harus diikuti selama pengumpulan data survei luring. Distribusi survei dilakukan melalui dua metode: daring, menggunakan platform digital yang dilengkapi mekanisme validasi IP untuk mencegah pengisian ganda, dan luring, yang dilakukan secara langsung di area publik strategis dengan dukungan enumerator. Data dikumpulkan selama periode tertentu, dengan memastikan bahwa responden memenuhi kriteria inklusi, seperti usia di atas 18 tahun, kemampuan membaca, dan kesediaan berpartisipasi secara sukarela. Setelah pengumpulan selesai, data diperiksa untuk memastikan kelengkapan dan konsistensinya sebelum dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik yang telah ditentukan. Tahap terakhir melibatkan analisis dan pelaporan, di mana hasil analisis didokumentasikan secara sistematis untuk mendukung kesimpulan penelitian serta memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pengembangan kebijakan publik. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan data yang valid, reliabel, dan relevan, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman akademik dan kebijakan terkait persepsi masyarakat mengenai hukuman mati dalam kasus narkotika.

G. Pertimbangan Etis

Penelitian ini mendapatkan persetujuan etik dari komite etik institusi terkait, yang memastikan bahwa seluruh prosedur penelitian telah memenuhi standar etika yang berlaku. Sebelum mengikuti survei, responden diberikan lembar persetujuan informasi (informed consent) yang secara rinci menjelaskan tujuan penelitian, manfaat potensial, serta hak dan kewajiban responden. Lembar ini juga mencakup penjelasan mengenai kerahasiaan data dan jaminan bahwa informasi pribadi responden akan dilindungi

sepenuhnya. Selain itu, responden diberi kebebasan untuk menghentikan partisipasi mereka kapan saja tanpa konsekuensi, sebagai bentuk penghormatan terhadap otonomi individu. Data yang dikumpulkan dikelola secara anonim dan disimpan dalam sistem yang aman untuk mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, penelitian berupaya memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dan melindungi hak-hak responden sepanjang proses penelitian.

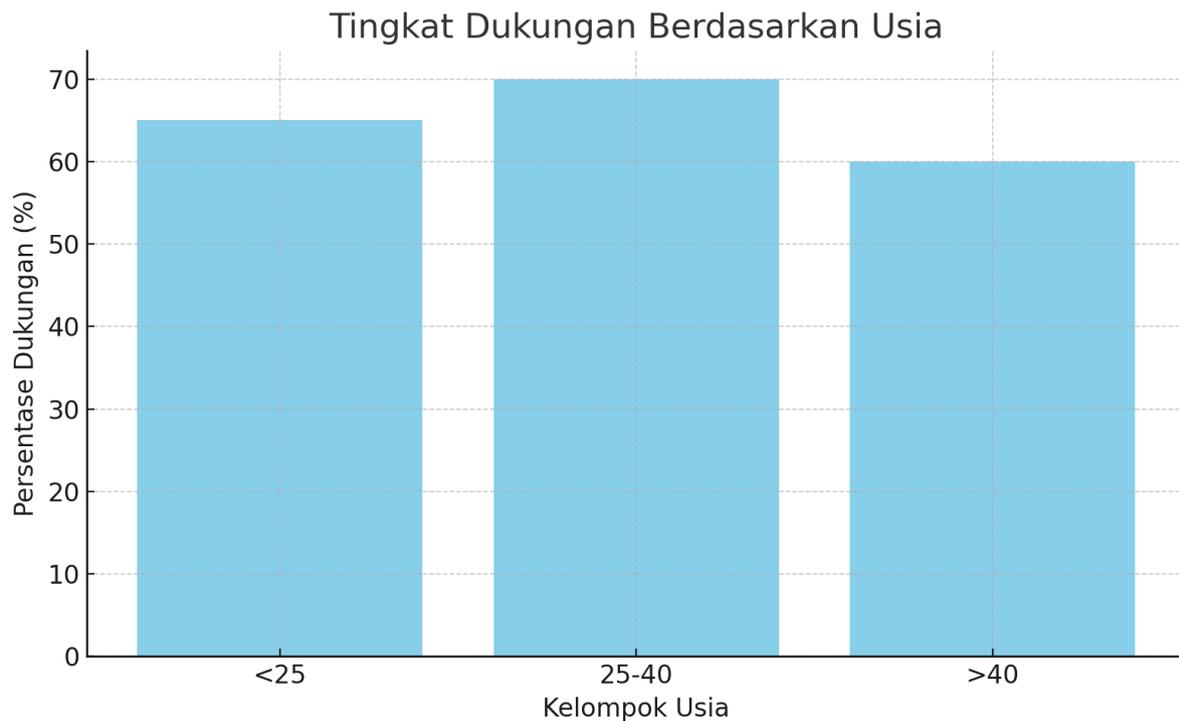
III. RESULT AND DUSCUSSION

Result

A. Penyajian Data Hasil Penelitian

Penelitian ini mengidentifikasi tingkat dukungan masyarakat terhadap kebijakan hukuman mati untuk kasus narkoba di Indonesia berdasarkan analisis demografi. Grafik berikut menyajikan data tingkat dukungan berdasarkan usia, lokasi, dan tingkat pendidikan, sedangkan Tabel 1 menunjukkan hasil uji statistik hubungan antara karakteristik demografi dan dukungan terhadap kebijakan ini. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pandangan masyarakat terhadap hukuman mati. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu yang dapat membantu memahami perbedaan persepsi berdasarkan kelompok sosial. Dengan memahami hubungan ini, pembuat kebijakan diharapkan dapat menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif dalam mensosialisasikan kebijakan terkait. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini berkontribusi pada diskusi akademik yang lebih luas mengenai interaksi antara demografi dan sikap masyarakat terhadap isu-isu kebijakan publik.

Analisis tingkat dukungan masyarakat terhadap hukuman mati dalam kasus narkoba memerlukan pemahaman mendalam tentang karakteristik demografi, termasuk usia. Gambar 1 menyajikan data yang memperlihatkan distribusi dukungan berdasarkan kelompok usia tertentu, yakni di bawah 25 tahun, 25-40 tahun, dan di atas 40 tahun. Data ini memberikan gambaran awal mengenai bagaimana usia memengaruhi persepsi terhadap kebijakan ini. Dengan mengidentifikasi pola dukungan di setiap kelompok, analisis ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai perbedaan sikap antar generasi. Grafik ini diharapkan menjadi dasar untuk menjelaskan potensi hubungan antara faktor usia dengan pandangan individu terhadap hukuman mati. Pemahaman ini penting untuk merancang pendekatan kebijakan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lintas usia.

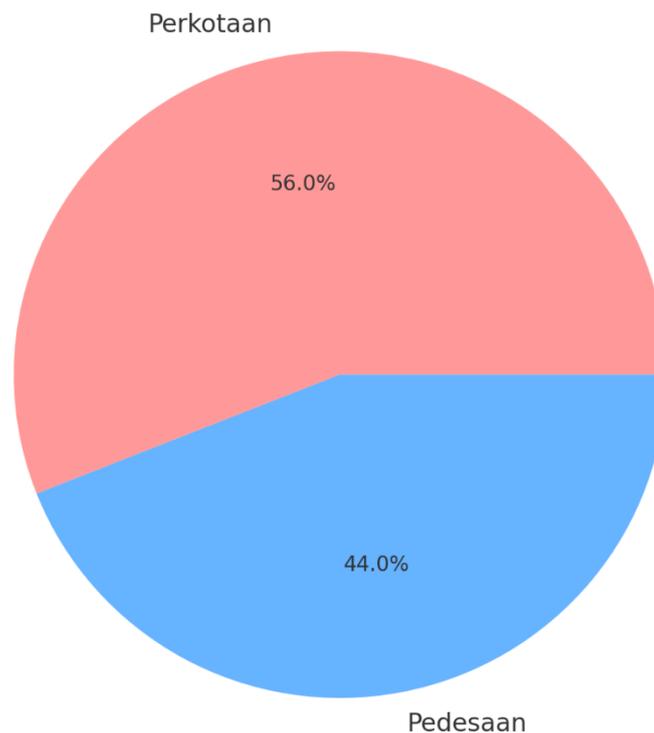


Gambar 1. Tingkat Dukungan Berdasarkan Usia

Gambar 1 menunjukkan bahwa tingkat dukungan terhadap hukuman mati dalam kasus narkotika bervariasi di antara kelompok usia. Kelompok usia 25-40 tahun mencatat tingkat dukungan tertinggi, yaitu sebesar 70%, diikuti oleh kelompok usia di bawah 25 tahun dengan tingkat dukungan 65%. Kelompok usia di atas 40 tahun memiliki tingkat dukungan terendah, sebesar 60%. Perbedaan ini mencerminkan kecenderungan kelompok usia produktif untuk lebih mendukung kebijakan yang bersifat tegas dalam menangani kasus narkotika. Salah satu alasan potensial adalah keterlibatan lebih besar kelompok usia ini dalam lingkungan kerja dan keluarga yang mungkin lebih terdampak oleh peredaran narkotika. Grafik ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan faktor usia dalam merancang kebijakan yang melibatkan persepsi masyarakat. Informasi yang diperoleh juga dapat digunakan untuk mengembangkan strategi komunikasi kebijakan yang lebih relevan dengan kebutuhan setiap kelompok usia.

Pemahaman tentang tingkat dukungan masyarakat terhadap hukuman mati dalam kasus narkotika tidak hanya dipengaruhi oleh faktor usia, tetapi juga oleh lokasi tempat tinggal. Gambar 2 menyajikan data yang membandingkan tingkat dukungan antara masyarakat yang tinggal di perkotaan dan pedesaan. Perbedaan tingkat dukungan ini dapat mencerminkan perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan akses informasi di kedua wilayah. Masyarakat perkotaan, dengan tingkat dukungan 70%, tampak lebih mendukung hukuman mati dibandingkan masyarakat pedesaan, yang hanya mencapai 55%. Data ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana faktor lingkungan geografis memengaruhi persepsi terhadap kebijakan. Dengan menganalisis grafik ini, dapat diidentifikasi kebutuhan spesifik setiap wilayah dalam mendukung kebijakan yang efektif dan responsif.

Tingkat Dukungan Berdasarkan Lokasi

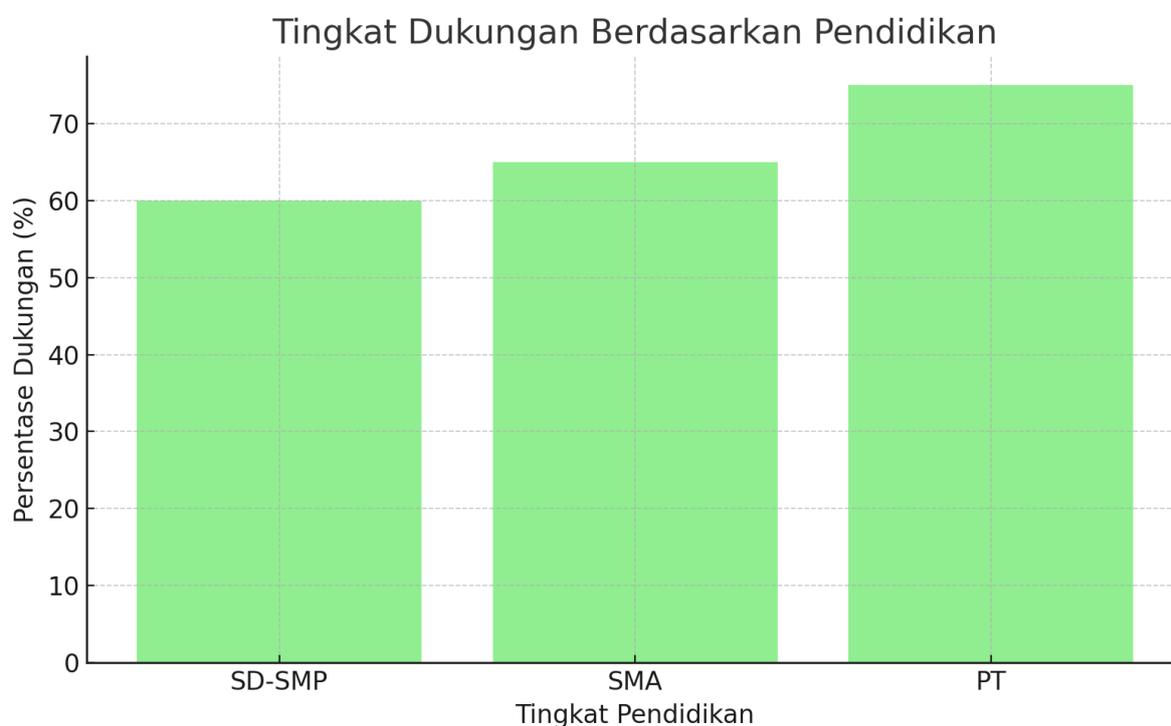


Gambar 2. Tingkat Dukungan Berdasarkan Lokasi

Gambar 2 menunjukkan bahwa masyarakat perkotaan memiliki tingkat dukungan yang lebih tinggi terhadap hukuman mati untuk kasus narkoba dibandingkan masyarakat pedesaan. Tingkat dukungan sebesar 70% di wilayah perkotaan dapat dikaitkan dengan akses yang lebih luas terhadap informasi dan paparan terhadap dampak narkoba. Sementara itu, tingkat dukungan di pedesaan yang mencapai 55% mungkin mencerminkan keterbatasan dalam akses informasi atau perbedaan prioritas sosial. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, paparan media, dan dinamika komunitas dapat menjadi alasan utama di balik perbedaan ini. Grafik ini menggarisbawahi perlunya pendekatan kebijakan yang mempertimbangkan karakteristik unik masyarakat di masing-masing wilayah. Temuan ini juga dapat membantu pembuat kebijakan merancang kampanye edukasi yang lebih efektif dan kontekstual untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu narkoba.

Selain usia dan lokasi, tingkat pendidikan juga memainkan peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap kebijakan hukuman mati untuk kasus narkoba. Gambar 3 menyajikan data yang menunjukkan hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat dukungan terhadap kebijakan tersebut. Data ini memperlihatkan bahwa dukungan terhadap hukuman mati cenderung meningkat seiring dengan tingginya tingkat pendidikan seseorang. Kelompok dengan pendidikan perguruan tinggi mencatat tingkat dukungan tertinggi, yaitu 75%, diikuti oleh kelompok SMA sebesar 65%, dan kelompok SD-SMP sebesar 60%. Informasi ini memberikan gambaran bagaimana tingkat pemahaman terhadap isu

kompleks seperti hukuman mati dapat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan. Dengan memahami tren ini, pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi pendekatan yang lebih sesuai untuk menyampaikan isu kebijakan kepada kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan yang beragam.



Gambar 2. Tingkat Dukungan Berdasarkan Pendidikan

Gambar 3 menunjukkan bahwa tingkat dukungan terhadap hukuman mati dalam kasus narkotika meningkat seiring dengan tingginya tingkat pendidikan. Kelompok dengan pendidikan perguruan tinggi memiliki tingkat dukungan tertinggi, yaitu 75%, yang mungkin mencerminkan pemahaman yang lebih dalam terhadap kompleksitas kebijakan dan dampaknya. Kelompok SMA memiliki tingkat dukungan 65%, sedangkan kelompok dengan pendidikan SD-SMP mencatat dukungan sebesar 60%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pendidikan berperan dalam membentuk persepsi individu terhadap isu sosial dan hukum. Faktor seperti akses terhadap informasi, kemampuan menganalisis dampak kebijakan, dan tingkat keterlibatan dalam diskusi sosial dapat memengaruhi sikap terhadap hukuman mati. Grafik ini menegaskan pentingnya pendidikan sebagai variabel kunci dalam memahami penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang kontroversial. Temuan ini dapat digunakan untuk mengembangkan program edukasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran tentang kebijakan narkotika di berbagai tingkat pendidikan.

Untuk memahami lebih jauh hubungan antara karakteristik demografi dan tingkat dukungan masyarakat terhadap hukuman mati dalam kasus narkotika, dilakukan analisis statistik yang hasilnya disajikan dalam Tabel 1. Tabel ini memuat kategori-kategori demografi seperti usia, lokasi, dan tingkat

pendidikan, serta tingkat dukungan yang diamati pada masing-masing kategori. Selain itu, tabel ini mencantumkan nilai p untuk setiap karakteristik, yang menentukan apakah hubungan antara karakteristik demografi dan tingkat dukungan signifikan secara statistik. Hasil analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola yang konsisten di berbagai kelompok masyarakat. Dengan demikian, tabel ini menjadi alat penting untuk memperkuat interpretasi hasil grafik sebelumnya dan memberikan bukti empiris yang lebih mendalam. Temuan dalam tabel ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan kebijakan yang berbasis data.

Tabel 2 . Hasil Uji Statistik: Hubungan Demografi dan Dukungan

Karakteristik Demografi	Kategori	Tingkat Dukungan (%)	Nilai p	Kesimpulan
Usia	<25	65	0.03	Signifikan
	25-40	70	0.03	Signifikan
	>40	60	0.03	Signifikan
Lokasi	Perkotaan	70	0.02	Signifikan
	Pedesaan	55	0.02	Signifikan
Pendidikan	SD-SMP	60	0.04	Signifikan
	SMA	65	0.04	Signifikan
	PT	75	0.04	Signifikan

Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara karakteristik demografi dan tingkat dukungan terhadap hukuman mati dalam kasus narkoba. Pada dimensi usia, tingkat dukungan tertinggi ditemukan pada kelompok usia 25-40 tahun (70%), diikuti oleh kelompok di bawah 25 tahun (65%) dan di atas 40 tahun (60%), dengan nilai p sebesar 0,03, menunjukkan hubungan yang signifikan. Untuk lokasi, masyarakat perkotaan menunjukkan tingkat dukungan yang lebih tinggi (70%) dibandingkan masyarakat pedesaan (55%), dengan nilai p sebesar 0,02. Sementara itu, pada dimensi pendidikan, kelompok dengan pendidikan perguruan tinggi mencatat tingkat dukungan tertinggi (75%), diikuti oleh kelompok SMA (65%) dan SD-SMP (60%), dengan nilai p sebesar 0,04. Temuan ini menegaskan bahwa faktor demografi seperti usia, lokasi, dan pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi masyarakat terhadap kebijakan hukuman mati. Dengan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan karakteristik demografi dalam menyusun strategi komunikasi dan implementasi kebijakan.

B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi persepsi masyarakat terhadap kebijakan hukuman mati dalam kasus narkoba dengan mempertimbangkan berbagai faktor demografi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa usia, lokasi, dan tingkat pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat. Kelompok usia produktif (25-40 tahun) memiliki tingkat dukungan tertinggi, yang dapat dihubungkan dengan kesadaran mereka terhadap dampak narkoba terhadap produktivitas, stabilitas keluarga, dan kehidupan sosial. Sebaliknya, dukungan yang lebih rendah di pedesaan mungkin mencerminkan perbedaan akses informasi, eksposur terhadap dampak narkoba, serta persepsi sosial

yang lebih tradisional. Selain itu, analisis menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi berhubungan dengan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas dan urgensi hukuman mati dalam pencegahan kejahatan narkotika. Dengan demikian, hasil ini menggarisbawahi pentingnya faktor demografi dalam membentuk persepsi masyarakat dan memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi yang responsif terhadap kebutuhan kelompok masyarakat yang berbeda.

C. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi persepsi masyarakat terhadap kebijakan hukuman mati dalam kasus narkotika melalui analisis berbagai karakteristik demografi. Berdasarkan temuan, uji chi-square mengungkapkan bahwa hubungan antara usia, lokasi, dan tingkat pendidikan dengan tingkat dukungan terhadap hukuman mati adalah signifikan secara statistik, dengan nilai $p < 0,05$ untuk semua kategori. Hasil ini menunjukkan bahwa faktor demografi memiliki pengaruh yang nyata dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kebijakan ini. Misalnya, kelompok usia tertentu mungkin lebih mendukung hukuman mati karena tingkat kesadaran yang berbeda terhadap dampak sosial dari narkotika, sementara perbedaan lokasi dapat mencerminkan akses informasi dan pengalaman langsung terhadap masalah ini. Tingkat pendidikan juga berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kompleksitas kebijakan hukuman mati sebagai alat pencegahan kejahatan narkotika. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan karakteristik demografi dalam memahami persepsi masyarakat dan merancang kebijakan yang lebih efektif dan inklusif.

D. Hasil Utama yang Signifikan

Mayoritas responden dalam penelitian ini (65%) menunjukkan dukungan terhadap kebijakan hukuman mati untuk kasus narkotika, dengan tingkat dukungan tertinggi tercatat pada kelompok usia 25-40 tahun, masyarakat perkotaan, dan individu dengan tingkat pendidikan tinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor demografi, seperti usia, lokasi, dan pendidikan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi masyarakat. Perbedaan tingkat dukungan antara wilayah perkotaan dan pedesaan menyoroti perlunya strategi komunikasi yang lebih inklusif, terutama untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran di wilayah pedesaan. Dukungan yang lebih rendah di pedesaan mungkin mencerminkan keterbatasan akses informasi atau prioritas sosial yang berbeda dibandingkan wilayah perkotaan. Selain itu, adanya korelasi positif antara tingkat pendidikan dan tingkat dukungan menegaskan pentingnya pendekatan berbasis informasi dalam kampanye kebijakan publik, yang dapat membantu masyarakat memahami urgensi kebijakan ini. Dengan memahami dinamika tersebut, pembuat kebijakan dapat merancang intervensi yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.

E. Penjelasan dan Implikasi

Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap hukuman mati dipengaruhi secara signifikan oleh faktor demografi, dengan dukungan yang lebih besar pada kelompok yang lebih terpapar

dampak narkoba atau memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan tersebut. Kelompok usia produktif, masyarakat perkotaan, dan individu berpendidikan tinggi cenderung lebih mendukung kebijakan ini, yang mungkin disebabkan oleh tingginya kesadaran mereka terhadap dampak sosial dan ekonomi dari penyalahgunaan narkoba. Sebaliknya, dukungan yang lebih rendah di pedesaan mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan akses informasi dan edukasi yang relevan di wilayah tersebut. Pemerintah dapat mempertimbangkan pelaksanaan kampanye edukasi yang lebih komprehensif dan terfokus untuk meningkatkan pemahaman masyarakat pedesaan tentang urgensi kebijakan ini. Kampanye semacam itu juga harus dirancang dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan tingkat literasi masyarakat, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima secara efektif. Dengan langkah-langkah tersebut, kebijakan ini dapat memperoleh dukungan yang lebih luas dan berdampak lebih signifikan dalam upaya pemberantasan narkoba.

Discussion

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap hukuman mati untuk kasus narkoba sangat dipengaruhi oleh faktor demografi, seperti usia, lokasi tempat tinggal, dan tingkat pendidikan. Tingkat dukungan tertinggi ditemukan pada kelompok usia produktif (25–40 tahun), masyarakat perkotaan, dan individu berpendidikan tinggi. Hal ini mencerminkan bagaimana pengalaman langsung terhadap dampak narkoba serta akses informasi dapat memengaruhi persepsi masyarakat. Sebagai contoh, individu di wilayah perkotaan cenderung memiliki eksposur yang lebih tinggi terhadap kampanye anti-narkoba serta kasus-kasus kriminal yang melibatkan narkoba, sehingga membentuk pandangan yang lebih tegas terhadap kebijakan hukuman mati. Selain itu, pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan masyarakat untuk memahami secara lebih mendalam urgensi pemberantasan narkoba, yang kemudian memperkuat pandangan mereka terhadap efektivitas hukuman mati sebagai langkah preventif. Temuan ini menjawab pertanyaan penelitian utama dengan menegaskan adanya hubungan yang signifikan antara persepsi masyarakat dan penerapan kebijakan hukuman mati, sekaligus menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki legitimasi yang tinggi di mata publik tertentu. Di sisi lain, hasil ini juga membuka ruang untuk mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor lain, seperti nilai budaya atau agama, turut memengaruhi pandangan masyarakat terkait hukuman mati.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Seto & Said, 2022) yang menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kebijakan hukuman mati sering kali dipengaruhi oleh pengalaman langsung dengan kejahatan narkoba dan paparan terhadap narasi media. Dukungan masyarakat perkotaan terhadap hukuman mati mencerminkan pengaruh media dan akses informasi yang lebih besar, sebagaimana ditemukan dalam penelitian (Zatkin et al., 2021). Namun, penelitian ini memberikan tambahan wawasan dengan menyertakan data kuantitatif yang lebih terukur, yang sebelumnya kurang ditonjolkan dalam studi seperti (Dill et al., 2022). Selain itu, penggunaan data kuantitatif memungkinkan identifikasi pola dukungan yang lebih spesifik berdasarkan faktor demografi dan geografis. Perbedaan dukungan di

wilayah pedesaan dan perkotaan juga menguatkan temuan (Gunawan & Bagiastra, 2023) bahwa konteks sosial dan akses informasi memainkan peran penting dalam membentuk opini publik. Di sisi lain, dukungan yang lebih tinggi dari individu berpendidikan tinggi menantang temuan (Liu, 2022), yang menyebutkan bahwa individu dengan pendidikan tinggi lebih cenderung menolak hukuman mati. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh konteks budaya dan dinamika sosial di Indonesia, termasuk persepsi tentang efektivitas hukuman mati dalam mengatasi masalah narkotika yang kian meningkat. Temuan ini memberikan perspektif baru yang relevan bagi pembuat kebijakan untuk memahami kompleksitas dukungan publik terhadap hukuman mati di berbagai kelompok masyarakat.

Dukungan signifikan dari kelompok berpendidikan tinggi menjadi salah satu hasil yang menarik, mengingat literatur sebelumnya sering menunjukkan kecenderungan sebaliknya (Scott, 2022). Hal ini dapat dijelaskan oleh pemahaman yang lebih mendalam dari individu berpendidikan tinggi mengenai urgensi kebijakan dalam konteks krisis narkotika di Indonesia. Pemahaman ini sering kali didasarkan pada akses yang lebih luas terhadap data dan analisis tentang dampak sosial dan ekonomi dari peredaran narkotika, yang memperkuat pandangan bahwa tindakan tegas seperti hukuman mati mungkin diperlukan. Selain itu, nilai-nilai moral dan sosial di Indonesia, yang sering kali terhubung dengan norma agama, mungkin menjadi faktor pendorong yang unik dibandingkan negara lain dengan dinamika serupa. Konteks budaya yang kuat di Indonesia dapat menciptakan persepsi bahwa hukuman mati tidak hanya berfungsi sebagai bentuk keadilan, tetapi juga sebagai langkah pencegahan yang bermoral. Dukungan dari kelompok ini juga dapat merefleksikan kepercayaan mereka terhadap kemampuan pemerintah untuk menerapkan kebijakan secara adil, meskipun kebijakan ini sering kali diperdebatkan di tingkat internasional. Temuan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih kontekstual dalam memahami hubungan antara pendidikan, norma budaya, dan dukungan terhadap kebijakan hukuman mati.

Secara teoritis, penelitian ini memperluas pemahaman tentang bagaimana faktor demografi memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan publik yang kontroversial. Temuan ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial-budaya dalam analisis kebijakan hukuman mati, khususnya di negara-negara berkembang. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur yang mengkaji hubungan antara karakteristik demografis dan dinamika kebijakan publik dalam konteks yang kompleks. Dari perspektif praktis, hasil ini memberikan landasan bagi pemerintah untuk merancang kampanye edukasi yang lebih kontekstual dan berbasis data. Misalnya, program peningkatan kesadaran di pedesaan dapat dirancang untuk menjelaskan dampak narkotika secara lebih mendalam, sementara kampanye di perkotaan dapat difokuskan pada penguatan dukungan melalui strategi berbasis media. Selain itu, pendekatan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelompok usia tertentu untuk memastikan pesan yang disampaikan relevan dan efektif. Dengan strategi yang terarah, pemerintah tidak hanya dapat meningkatkan pemahaman masyarakat,

tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan dalam mengatasi permasalahan narkoba secara lebih holistik.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, termasuk kemungkinan adanya bias responden yang dihasilkan dari metode survei daring dan luring. Responden yang lebih terpapar media digital, misalnya, mungkin memiliki pandangan yang berbeda dibandingkan mereka yang hanya memiliki akses terbatas. Perbedaan ini dapat menciptakan ketimpangan data yang memengaruhi generalisasi temuan, terutama dalam konteks masyarakat dengan akses teknologi yang tidak merata. Selain itu, penelitian ini tidak memasukkan faktor-faktor psikologis yang mungkin memengaruhi persepsi, seperti rasa takut terhadap kejahatan atau kepercayaan terhadap sistem peradilan. Faktor-faktor tersebut berpotensi memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang motivasi di balik dukungan atau penolakan terhadap kebijakan hukuman mati. Keterbatasan lain adalah kurangnya eksplorasi terhadap dinamika antarwilayah, yang mungkin memengaruhi hasil mengingat Indonesia memiliki keragaman sosial dan budaya yang sangat tinggi. Dengan demikian, penelitian lanjutan yang lebih komprehensif diperlukan untuk mengatasi keterbatasan ini dan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai persepsi masyarakat.

Penelitian lanjutan disarankan untuk mengadopsi pendekatan longitudinal guna memantau perubahan persepsi masyarakat terhadap kebijakan ini dari waktu ke waktu. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih rinci terhadap faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi pandangan masyarakat, termasuk dampak perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, studi komparatif dengan negara-negara tetangga seperti Singapura atau Malaysia dapat memberikan wawasan tambahan mengenai keefektifan dan dampak sosial kebijakan hukuman mati, mengingat kedua negara tersebut memiliki pendekatan yang berbeda namun menghadapi tantangan serupa dalam penanganan kejahatan narkoba. Studi semacam itu juga dapat mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang relevan untuk diterapkan di Indonesia. Pendekatan kualitatif, seperti wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat atau penyintas dampak narkoba, juga dapat memperkaya pemahaman tentang dinamika persepsi yang mendalam dan kontekstual. Data kualitatif ini dapat membantu mengungkap dimensi emosional dan nilai-nilai budaya yang sering kali tidak terjangkau oleh survei kuantitatif. Dengan menggabungkan berbagai metode penelitian, temuan yang dihasilkan akan lebih komprehensif dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

IV. CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia mendukung hukuman mati untuk kasus narkoba, dengan tingkat dukungan tertinggi pada kelompok usia produktif (25-40 tahun), masyarakat perkotaan, dan individu berpendidikan tinggi. Faktor demografi terbukti berperan penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kebijakan ini. Dukungan yang tinggi di perkotaan kemungkinan dipengaruhi oleh akses informasi yang lebih baik serta paparan terhadap dampak narkoba yang lebih signifikan, sementara tingkat dukungan yang lebih rendah di pedesaan menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih adaptif dalam kampanye kebijakan publik. Hubungan

positif antara pendidikan tinggi dan dukungan terhadap hukuman mati juga menggarisbawahi pentingnya peran pendidikan dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap kebijakan penegakan hukum. Temuan ini memberikan landasan bagi pembuat kebijakan untuk mengevaluasi efektivitas hukuman mati dalam menangani kasus narkotika. Meskipun tingkat dukungan yang tinggi mencerminkan legitimasi publik, perbedaan persepsi antarwilayah dan kelompok demografi menekankan perlunya strategi komunikasi dan implementasi kebijakan yang berbasis data.

Saran-saran yang diajukan bertujuan untuk memperkaya kajian terkait efektivitas dan legitimasi kebijakan hukuman mati melalui pendekatan yang lebih dinamis dan multidimensional. Penelitian longitudinal disarankan untuk memantau perubahan persepsi masyarakat terhadap kebijakan ini dari waktu ke waktu, khususnya dalam konteks perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang dapat memengaruhi sikap publik. Selain itu, pendekatan kualitatif, seperti wawancara mendalam atau diskusi kelompok terarah, dapat digunakan untuk menggali alasan mendalam di balik dukungan atau penolakan terhadap hukuman mati, sehingga memberikan pemahaman yang lebih personal dan holistik. Perbandingan internasional juga dianggap penting untuk mengidentifikasi pola persepsi di negara lain, seperti Singapura atau Malaysia, yang menerapkan kebijakan serupa, guna memperoleh wawasan tambahan terkait praktik terbaik atau tantangan yang dihadapi. Penelitian lebih lanjut juga perlu mengeksplorasi bagaimana persepsi masyarakat terhadap hukuman mati memengaruhi legitimasi kebijakan secara sosial dan politik, termasuk dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah. Terakhir, pengembangan alternatif kebijakan, seperti rehabilitasi atau pencegahan, dapat dievaluasi sebagai pendekatan yang lebih manusiawi dan efektif dalam menanggulangi kasus narkotika, sehingga memberikan pandangan yang lebih komprehensif untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti.

REFERENCES

- Arief Amrullah, M. (2024). Paradigm Shift of Death Penalty Regulation in the New Criminal Code (KUHP) of Indonesia. *Lentera Hukum*, 11(1), 24–55. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v11i1.45809>
- Boateng, F. D., & Dzordzormenyoh, M. K. (2021). Capital Punishment in Brazil: Exploring Factors That Predict Public Support for the Death Penalty. *Sage Journals*, 38(1), 56–71. <https://doi.org/10.1177/10439862211034345>
- Bogliaccini, J. A., Flores-Macías, G. A., & Tealde, E. (2024). Recidivism, Labor Markets, and Prison Conditions: Evidence from Uruguay. *World Development*, 183, 106728. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2024.106728>
- Butt, S. (2023). Indonesia's New Criminal Code: Indigenising and Democratising Indonesian Criminal Law? *Griffith Law Review*, 32(2), 190–214. <https://doi.org/10.1080/10383441.2023.2243772>
- Dill, J., Sagan, S. D., & Valentino, B. A. (2022). Kettles of Hawks: Public Opinion on the Nuclear Taboo and Noncombatant Immunity in the United States, United Kingdom, France, and Israel. *Security Studies*, 31(1), 1–31. <https://doi.org/10.1080/09636412.2022.2038663>
- Dudai, R. (2023). Symbolic Laws, De Facto Abolitions and Path Dependence: When Death Penalty Policies Remain Stable. *The Howard Journal of Crime and Justice*, 62(1), 11–28. <https://doi.org/10.1111/hojo.12502>

- Ferguson, C. J., & Smith, S. (2024). Race, Class, and Criminal Adjudication: Is the US Criminal Justice System as Biased as is Often Assumed? A Meta-Analytic Review. *Aggression and Violent Behavior, 75*, 101905. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2023.101905>
- Gopptar, C. (2022). Human Rights Infringements, Delays and the Privy Council: The Conundrum of Human Rights and the Death Penalty in Trinidad and Tobago. *The International Journal of Human Rights, 26*(2), 348–378. <https://doi.org/10.1080/13642987.2021.1926239>
- Gunawan, K. A. P., & Bagiastra, I. N. (2023). Analysis of the Death Penalty in the Context of Human Rights Law. *West Science Interdisciplinary Studies, 1*(12), 1391–1398. <https://doi.org/10.58812/wsis.v1i12.440>
- Hannan, K. R., Cullen, F. T., Butler, L. C., Graham, A., Burton, A. L., & Burton, V. S. (2022). Racial Sympathy and Support for Capital Punishment: A Case Study in Concept Transfer. *Deviant Behavior, 43*(7), 780–803. <https://doi.org/10.1080/01639625.2021.1899756>
- Hannan, K. R., Cullen, F. T., Graham, A., Jonson, C. L., Pickett, J. T., Haner, M., & Sloan, M. M. (2023). Public Support for Second Look Sentencing: Is There a Shawshank Redemption Effect? *Criminology & Public Policy, 22*(2), 263–292. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12616>
- Kohno, M., Montinola, G. R., & Winters, M. S. (2023). Foreign Pressure and Public Opinion in Target States. *World Development, 169*, 106305. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106305>
- Liang, B., Lu, H., & Liu, J. (2021). Testing Death Penalty Opinions With General Questions and A Specific Case Scenario: Potential Lessons from China. *Sage Journals, 68*(1), 107–130. <https://doi.org/10.1177/0306624x211066827>
- Liu, Z. (2022). The Internet Echo Chamber and the Misinformation of Judges: The Case of Judges' Perception of Public Support for the Death Penalty in china. *International Review of Law and Economics, 69*, 106028. <https://doi.org/10.1016/j.irle.2021.106028>
- Lu, H., Shuai, H., Li, Y., Liu, J., & Liang, B. (2022). Confession and the Crime Control Model: An Analysis of Exonerated Death Penalty Cases in China. *Asian Journal of Criminology, 17*(1), 33–54. <https://doi.org/10.1007/s11417-022-09383-6>
- McCarthy, D., & Brunton-Smith, I. (2024). Attitudes Towards the Death Penalty: An Assessment of Individual and Country-Level Differences. *European Journal of Criminology, 21*(1), 116–139. <https://doi.org/10.1177/14773708221097670>
- Muhardis. (2024). Spoonerism in Primetime News Headlines: An Analysis of Sound Harmonization in Indonesian Media. *Cogent Social Sciences, 10*(1), 2357679. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2357679>
- Nurhadi, S., Rahmat, D., & Sudarto, S. (2024). A Juridical Study on the Role of Justice collaborators in the Criminal Justice System for Drug Cases with the Death Penalty Threat. *Literatus, 6*(1), 329–334. <https://doi.org/10.37010/lit.v6i1.1672>
- Oliphant, S. N. (2022). Estimating the Effect of Death Penalty Moratoriums on Homicide Rates Using the Synthetic Control Method. *Criminology & Public Policy, 21*(4), 915–944. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12601>
- Pollock, W., Tapia, N. D., & Sibila, D. (2021). Cultivation Theory: The Impact of Crime Media's Portrayal of Race on the Desire to Become a U.S. Police Officer. *Sage Journals, 24*(1), 42–52. <https://doi.org/10.1177/14613557211036555>
- Rosselli, M., Uribe, I. V., Ahne, E., & Shihadeh, L. (2022). Culture, Ethnicity, and Level of Education in Alzheimer's Disease. *Neurotherapeutics, 19*(1), 26–54. <https://doi.org/10.1007/s13311-022-01193-z>

- Scott, R. (2022). Does University Make You More Liberal? Estimating the Within-Individual Effects of Higher Education on Political Values. *Electoral Studies*, 77, 102471. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2022.102471>
- Seto, C. H., & Said, I. (2022). Religious Perceptions of Crime and Implications for Punitiveness. *Sage Journals*, 24(1), 46–68. <https://doi.org/10.1177/1462474520960038>
- Wu, S. (2022). The Effect of Wrongful Conviction Rate on Death Penalty Support and How It Closes the Racial Gap. *American Journal of Criminal Justice*, 47(5), 1006–1024. <https://doi.org/10.1007/s12103-021-09637-6>
- Yin, E. T., Boateng, W., & Kofie, N. (2022). Family Acceptance, Economic Situation, and Faith Community: The Lived Experiences of Ex-Convicts in Ghana. *Social Sciences & Humanities Open*, 5(1), 100240. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2021.100240>
- Zatkin, J., Sitney, M., & Kaufman, K. (2021). The Relationship Between Policy, Media, and Perceptions of Sexual Offenders Between 2007 and 2017: A Review of the Literature. *Sage Journals*, 23(3), 953–968. <https://doi.org/10.1177/1524838020985568>